

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

2.1.1 Pengertian UMKM

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008, pengertian UMKM dibagi menjadi tiga bagian yakni usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah. Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro. Usaha kecil adalah kegiatan ekonomi yang memenuhi kriteria sebagai usaha kecil yang tidak dikuasai oleh usaha menengah atau besar. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, ataupun menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.

Secara harfiah, Ariyanto (2021) mendefinisikan UMKM sebagai suatu usaha perdagangan yang dikelola oleh orang-perorangan atau berbentuk badan usaha yang kegiatan usahanya pada lingkup kecil atau mikro. Sementara itu menurut World Bank pada Yazfinedi (2018) UMKM harus memenuhi kriteria tertentu

mengenai jumlah karyawan, neraca tahunan (aset) dalam dolar US, dan omset dalam dolar US.

2.1.2 Kriteria UMKM

Berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008, UMKM diklasifikasikan menjadi tiga jenis usaha, yakni mikro, kecil, dan menengah. Usaha yang digolongkan sebagai UMKM harus memenuhi kriteria tertentu. Usaha mikro merupakan usaha dengan kekayaan bersih kurang dari Rp50 juta dan hasil penjualan maksimal per tahun Rp300 juta, usaha kecil merupakan usaha dengan kekayaan bersih selain tanah dan bangunan antara Rp50 juta hingga Rp500 juta dan hasil penjualan tahunan antara Rp300 juta hingga Rp2,5 miliar. Sementara itu, usaha menengah merupakan usaha dengan kekayaan bersih selain tanah dan bangunan Rp500 juta hingga Rp10 miliar dan hasil penjualan tahunan antara Rp2,5 miliar sampai Rp50 miliar. Selanjutnya, kriteria UMKM menurut UU No.20 Tahun 2008 dapat dilihat pada Tabel II.1 berikut.

Tabel II.1 Kriteria UMKM Menurut UU No.20 Tahun 2008

Kriteria	Usaha Mikro	Usaha Kecil	Usaha Menengah
Kekayaan bersih (tidak termasuk tanah dan bangunan)	$\leq$ Rp50 juta	Rp50 juta s.d. Rp500 juta	Rp500 juta s.d. Rp10 miliar
Hasil penjualan tahunan	$\leq$ Rp300 juta	Rp300 juta s.d. Rp2,5 miliar	Rp2,5 miliar s.d. Rp50 miliar

Sumber: Diolah dari UU No.20 Tahun 2008

Sementara itu menurut World Bank pada Yazfinedi (2018), UMKM dikategorikan berdasarkan jumlah karyawan dan jumlah aset atau penjualan tahunan. Menurut kriteria World Bank, karyawan dengan jumlah karyawan

kurang dari 10 dan jumlah aset atau jumlah penjualan tahunan kurang dari 100.000 dolar merupakan usaha mikro. Usaha kecil merupakan usaha dengan jumlah pegawai antara 10 sampai 50 dan jumlah aset atau penjualan per tahun sebesar 100.00 dolar hingga 3.000.000 dolar. Sementara itu, usaha menengah merupakan usaha produktif dengan jumlah karyawan lebih dari 50 dan tidak lebih dari 300 karyawan dengan jumlah aset atau penjualan tahunan antara 3.000.000 dolar hingga 15.000.000 dolar. Selanjutnya, kriteria UMKM menurut World Bank dapat dilihat pada Tabel II.2 berikut.

Tabel II.2 Kriteria UMKM Menurut World Bank

Kriteria	Usaha Mikro	Usaha Kecil	Usaha Menengah
Jumlah Karyawan	<10	>10; ≤50	>50; ≤300
Jumlah Aset atau Jumlah Penjualan Tahunan	≤Rp300 juta	Rp300 juta s.d. Rp2,5 miliar	Rp2,5 miliar s.d. Rp50 miliar

Sumber: Diolah dari (Yazfinedi, 2018)

2.2 Akuntansi

2.2.1 Pengertian Akuntansi

Menurut Weygandt *et al.* (2007), akuntansi merupakan akumulasi prosedur yang dimulai dari identifikasi, pencatatan, dan penyampaian informasi dari suatu peristiwa ekonomi pada entitas untuk diberikan kepada pihak-pihak yang memiliki kepentingan pada perusahaan. Identifikasi merupakan tahap awal pada proses akuntansi untuk mengkaji dan mengelompokkan transaksi yang berasal dari kegiatan ekonomi. Pencatatan adalah proses pembukuan semua bukti transaksi yang telah diidentifikasi. Informasi yang sudah tersedia karena adanya

proses identifikasi dan pencatatan kemudian disampaikan kepada pihak yang bersangkutan.

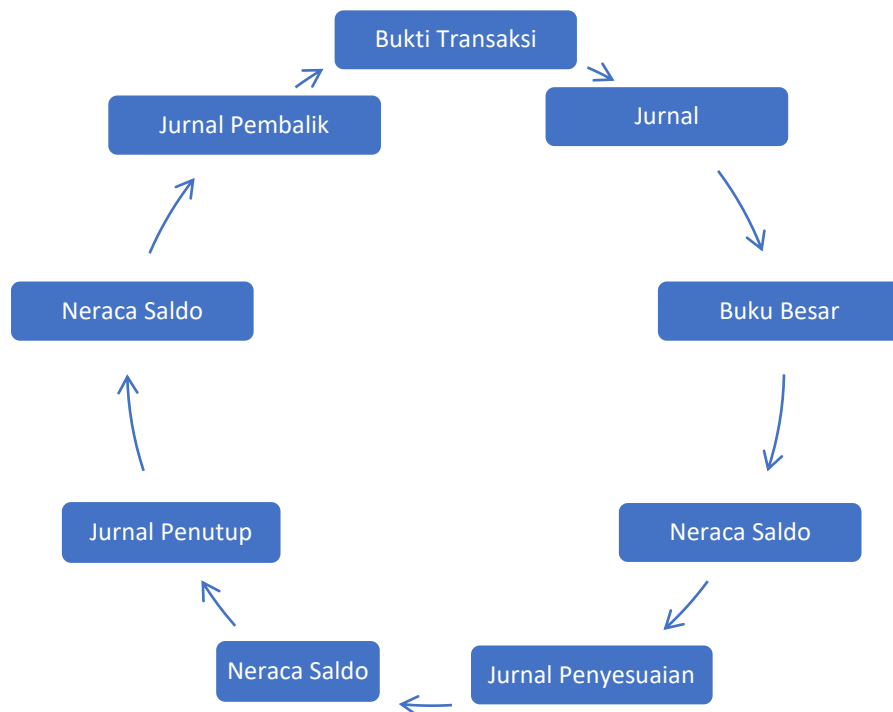
Akuntansi ditafsirkan sebagai satu proses pencatatan, penggolongan, pengikhtisaran mengenai transaksi keuangan yang disusun secara kronologis dan sistematis dan disajikan dalam sebuah laporan keuangan untuk melakukan pengambilan keputusan (Purnawirawan & Sastroatmodjo, 2021). Sementara itu, Gede (2015) menyatakan bahwa akuntansi memiliki arti yang lebih luas dalam arti meliputi pengetahuan mengenai tata buku, akuntansi juga meliputi pembuatan berbagai teknik pencatatan atau sistem akuntansi, interpretasi laporan keuangan, menyajikan berdasarkan prinsip tertentu, cara melaporkan fakta usaha, dan beberapa teknik untuk mengawasi seluruh aktivitas organisasi dari segi uang maupun kuantitas.

2.2.2 Siklus Akuntansi

Siklus akuntansi adalah proses yang wajib dilalui untuk dapat menyajikan informasi keuangan yang dibutuhkan. Proses yang harus dilalui antara lain analisis transaksi, penjurnalan, posting ke buku besar, penyusunan neraca saldo, pencatatan jurnal penyesuaian, menyusun neraca lajur, menyiapkan laporan keuangan, melakukan pencatatan jurnal penutup, dan menyiapkan neraca saldo setelah penutupan (Zamzami & Nusa, 2016).

Menurut Herry (2015), siklus akuntansi (*accounting cycle*) adalah sebuah proses akuntansi yang diawali dengan menganalisis dan menjurnal transaksi dan diakhiri dengan membuat laporan keuangan. Secara lebih rinci, tahapan siklus akuntansi diurutkan pada Gambar II.1.

Gambar II. 1. Siklus Akuntansi



Sumber: Diolah dari (Herry, 2015)

2.3 Laporan Keuangan

2.3.1 Pengertian Laporan Keuangan

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2013), laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan serta suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Laporan keuangan yang komprehensif terdiri dari neraca, laporan laba rugi, dan laporan perubahan posisi keuangan. Menurut Weygandt *et al.* (2007), laporan keuangan merupakan sarana penting yang digunakan untuk mengkomunikasikan suatu informasi keuangan perusahaan kepada pihak lain yang memiliki kepentingan terhadap perusahaan tersebut.

Laporan keuangan merupakan laporan yang diharapkan dapat memberi informasi mengenai perusahaan dan digabungkan dengan informasi lain seperti industri dan kondisi ekonomi sehingga dapat memberikan informasi mengenai prospek dan risiko perusahaan (Septiana, 2019). Menurut Riswan & Kesuma (2014), laporan keuangan merupakan perangkat khusus yang digunakan dalam mengevaluasi kinerja perusahaan, kinerja aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan. Risal & Wulandary (2018) menyatakan bahwa laporan keuangan menghasilkan informasi yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan oleh para pengguna laporan keuangan.

2.3.2 Tujuan Laporan Keuangan

Laporan keuangan memiliki tujuan untuk memberi informasi mengenai posisi keuangan suatu entitas yang dapat digunakan pengguna dalam proses pengambilan keputusan ekonomi oleh siapapun yang membutuhkan seperti kreditor dan investor. Laporan keuangan juga merupakan bentuk pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya (IAI, 2016). Menurut Septiana (2019), laporan keuangan bertujuan untuk memberikan informasi keuangan atau perusahaan, baik pada saat tertentu maupun periode tertentu untuk pihak dalam dan luar perusahaan yang memiliki kepentingan terhadap perusahaan.

Hidayat (2018) menyatakan bahwa secara garis besar, laporan keuangan dapat diklasifikasikan menjadi empat tujuan. Laporan keuangan harus memenuhi empat tujuan utama antara lain tujuan sarana informasi, tujuan pemahaman, tujuan peramalan, dan tujuan diagnosis.

2.3.3 Definisi dan Tujuan SAK EMKM

Pada 1 Januari 2018, SAK EMKM yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntansi Indonesia (DSAK IAI) dan terdiri dari 18 bab telah berlaku efektif untuk membantu UMKM dalam menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan. SAK EMMKM adalah standar akuntansi keuangan yang berdiri sendiri dan digunakan sebagai acuan entitas mikro, kecil, dan menengah atau entitas yang diizinkan untuk menggunakan standar tersebut untuk melakukan penyusunan laporan keuangan dengan standar yang lebih sederhana. SAK EMKM diacukan untuk entitas tanpa akuntabilitas publik yang signifikan dan memenuhi pengertian dan kriteria UMKM menurut Undang-Undang (IAI). Menurut Rahayu *et al.* (2020), tujuan SAK EMKM adalah menyediakan informasi mengenai posisi keuangan serta kinerja keuangan suatu entitas mikro, kecil, dan menengah yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi bagi pihak yang berkepentingan.

2.3.4 Kebijakan Akuntansi berdasarkan SAK EMKM

Kebijakan akuntansi merupakan prinsip, dasar, konvensi, aturan, dan praktik tertentu yang ditetapkan oleh suatu entitas untuk menyusun dan menyajikan laporan keuangan. Jika kebijakan akuntansi berdasarkan SAK EMKM secara spesifik mengatur perlakuan akuntansi atas suatu transaksi, peristiwa, atau keadaan lain, maka entitas menerapkan kebijakan sesuai SAK EMKM. Namun jika kebijakan akuntansi pada SAK EMKM tidak mengatur secara spesifik mengenai perlakuan suatu transaksi, peristiwa, atau keadaan lain, maka entitas

mengacu pada pertimbangan definisi, kriteria pengakuan, konsep pengukuran, serta prinsip pervasif yang ada pada Bab 2 SAK EMKM. Suatu entitas tidak mempertimbangan peraturan lain di luar pengaturan dalam SAK EMKM untuk suatu transaksi, peristiwa, atau keadaan lain tersebut (IAI, 2016).

2.4 Kinerja Keuangan

2.4.1 Pengertian Kinerja Keuangan

Kinerja keuangan adalah suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar. Analisis kinerja keuangan dilakukan dengan cara mengevaluasi kinerja masa lalu, selanjutnya memprediksi prospek masa depan perusahaan, kemudian mengevaluasi kembali apa yang sudah terjadi di masa lalu untuk meningkatkan kinerja keuangan perusahaan di masa yang akan datang (Hutabarat, 2021). Sementara itu Wijaya & Khoironi (2021) menyatakan bahwa kinerja keuangan merupakan suatu analisis untuk menggambarkan kondisi keuangan suatu perusahaan dalam menjalankan usahanya secara finansial yang ditunjukkan dalam laporan keuangan yang digunakan sebagai indikator keberhasilan perusahaan dalam menjalankan aktivitas keuangannya secara efisien dan efektif.

2.4.2 Tujuan Kinerja Keuangan

Menurut Hutabarat (2021), ada beberapa tujuan penilaian kinerja keuangan, yang dapat ditunjukkan sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui tingkat profitabilitas (kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu).

2. Untuk mengetahui tingkat likuiditas (kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajibannya pada saat ditagih).
3. Mengetahui tingkat solvabilitas (kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangan apabila perusahaan tersebut dilikuidasi).
4. Mengetahui tingkat stabilitas usaha (kemampuan perusahaan untuk menjalankan usaha dengan stabil).

2.5 Aplikasi Akuntansi UKM

Akuntansi UKM merupakan aplikasi yang dapat digunakan secara gratis pada telepon genggam berbasis Android. Pemilik UMKM hanya perlu menginput setiap transaksi kemudian secara otomatis aplikasi akan melakukan pemrosesan hingga terbentuk suatu laporan keuangan. Adanya aplikasi Akuntansi UKM membantu para pelaku UMKM untuk melakukan penyusunan laporan keuangan secara efisien dan efektif karena laporan keuangan dihasilkan secara otomatis oleh aplikasi sehingga menghasilkan laporan keuangan dalam bentuk *file* Microsoft Excel (Keparang *et al.*, 2021).

Menurut Salsabilla *et al.* (2021), pengguna aplikasi Akuntansi UMKM yang tidak memiliki latar belakang pada pendidikan akuntansi ataupun bisnis dapat menggunakan aplikasi tersebut karena fitur yang disediakan cukup sederhana. Basis penggunaan aplikasi ini dapat diakses dari telepon genggam berbasis Android sehingga diharapkan dapat mempermudah pelaku usaha untuk segera mencatat segala transaksi tanpa perlu menunda pencatatan.

Salah satu pertimbangan penggunaan aplikasi Akuntansi UKM adalah kebutuhan ruang penyimpanan aplikasi yang sedikit sehingga tidak mengganggu

kinerja telepon genggam. Selain itu, Aplikasi UKM memiliki fitur yang cukup bagi entitas untuk menyiapkan laporan keuangan yang dibutuhkan sehingga UMKM dapat menentukan besaran laba bersih dan pajak terutang yang dihasilkan dari operasi usaha yang dijalankan. Pengguna aplikasi juga dapat melihat posisi keuangan antara aset yang dimiliki dibandingkan kewajiban yang masih harus dibayar ditambah jumlah ekuitas sehingga pemilik usaha dapat mengetahui kesehatan ekonomi yang dijalankan dari usahanya (Putranto, 2020).